

**PERAN SEKTOR PERTANIAN TERHADAP DISTRIBUSI PENDAPATAN ANTAR
KABUPATEN DI PROVINSI D.I YOGYAKARTA**

Annajwa, Joko Sutrisno, Wiwit Rahayu

Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret Surakarta

Jl. Ir. Sutami No. 36 A Kentingan Surakarta 57126 Telp./Fax (0271) 637457

E-mail: annajwa18@gmail.com Telp: 081312500090

ABSTRACT

This study aims to determine the sub-sector of agriculture base and non-base and the role of agricultural sector to the distribution of income between districts in Province D.I Yogyakarta. The basic method used is descriptive analysis. The results of the Minimum Requirements Technique analysis of 2011-2015 show that the sub-sector of Bantul Regency: agriculture, livestock, hunting, agricultural and forestry services, logging and non-fishery sub-sector: fisheries. Basic sub-sector in Gunungkidul Regency: agriculture, livestock, hunting, agricultural services, forestry, logging and fishery. Basic sub-sector in Kulonprogo Regency: forestry, logging and fishery while non-base sub-sector: agriculture, livestock, hunting, agricultural services. Basic sub-sector in Sleman District: agriculture, livestock, hunting, agricultural and fishery services while non-forestry sub-sector: forestry, logging. The analysis of Williamson Index in 2011-2015 shows that the agricultural sector in Gunungkidul, Kulonprogo and Sleman districts play a role in reducing the inequality of income distribution in each region. This is indicated by a higher Williamson Index score when excluding the agricultural sector in the analysis. The agricultural sector in Bantul has a role to increase the inequality of income distribution. This is indicated by the lower Williamson Index value when excluding the agricultural sector in the analysis.

Keywords: *Agricultural sector, Minimum Requirements Technique, Williamson Index*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sub sektor pertanian basis dan non basis serta peran sektor pertanian terhadap distribusi pendapatan antar kabupaten di Provinsi D.I Yogyakarta. Metode dasar yang digunakan adalah deskriptif analisis. Hasil penelitian analisis *Minimum Requirements Technique* Tahun 2011-2015 menunjukkan bahwa sub sektor basis di Kabupaten Bantul: pertanian, peternakan, perburuan, jasa pertanian dan kehutanan, penebangan kayu sedangkan sub sektor non basis: perikanan. Sub sektor basis di Kabupaten Gunungkidul: pertanian, peternakan, perburuan, jasa pertanian, kehutanan, penebangan kayu dan perikanan. Sub sektor basis di Kabupaten Kulonprogo: kehutanan, penebangan kayu dan perikanan sedangkan sub sektor non basis: pertanian, peternakan, perburuan, jasa pertanian. Sub sektor basis di Kabupaten Sleman: pertanian, peternakan, perburuan, jasa pertanian dan perikanan sedangkan sub sektor non basis: kehutanan, penebangan kayu. Hasil analisis Indeks Williamson tahun 2011-2015 menunjukkan bahwa sektor pertanian di Kabupaten Gunungkidul, Kulonprogo dan Sleman berperan mengurangi ketidakmerataan distribusi pendapatan pada masing-masing wilayah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Indeks Williamson lebih tinggi ketika tanpa memasukkan sektor pertanian dalam analisis. Sektor pertanian di Kabupaten Bantul berperan meningkatkan ketidakmerataan distribusi pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Indeks Williamson lebih rendah ketika tanpa memasukkan sektor pertanian dalam analisis.

Kata Kunci: Sektor pertanian, *Minimum Requirements Technique*, Indeks Williamson

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang (Arsyad, 2010). Menurut Sutrisno (2012) Pembangunan ekonomi ialah suatu usaha memperbesar pendapatan per kapita dan meningkatkan produktivitas per kapita dengan jalan menambah peralatan modal dan *skill*. Tujuan pembangunan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan yang tinggi tentu akan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah atau daerah. PDRB atas dasar harga Konstan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun (Basuki, 2009).

Provinsi D.I Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa yang terdiri dari empat kabupaten yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Sleman.

Tabel 1. PDRB ADHK Tahun 2010 di Kabupaten yang Tergabung dalam Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2011-2015

Daerah Istimewa Yogyakarta	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Kab. Bantul	12.728.666,3	13.407.021,8	14.138.719,3	14.867.408,8	15.610.514,0
Kab. Gunungkidul	9.248.010,9	9.695.979,8	10.177.432,5	10.639.465,7	11.151.687,9
Kab. Kulonprogo	5.246.150,0	5.475.150,0	5.741.660,0	6.002.790,0	6.281.570,0
Kab. Sleman	22.645.851,9	23.957.112,8	25.367.414,2	26.740.537,1	28.159.673,9
Total PDRB	49.868.679,1	52.535.264,4	55.425.226,0	58.250.201,6	61.203.445,8

Sumber: BPS 2016^a, 2016^b, 2016^c, 2016^d.

Berdasarkan Tabel 1. menunjukkan bahwa nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 memenuhi kabupaten di Provinsi D.I Yogyakarta pada tahun 2011-2015 terus mengalami peningkatan. Peningkatan PDRB ini menunjukkan bahwa pertumbuhan perekonomian di Provinsi D.I Yogyakarta kegiatan ekonomi yang positif. Peningkatan nilai yang terjadi di daerah tersebut merupakan hasil dari kegiatan sektor perekonomian yang bersifat produktif.

Tabel 2. Nilai dan Kontribusi PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha Tahun 2010 di Kabupaten yang Tergabung dalam Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2015

No	Sektor Perekonomian	PDRB	
		Nilai	Kontribusi (%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.677.235,1	12,54%
2	Pertambangan dan Penggalian	471.313,8	0,77
3	Industri Pengolahan	7.672.861,3	12,53
4	Pengadaan Listrik, Gas	71.371,8	0,11
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	52.927,4	0,08
6	Konstruksi	6.211.733,1	10,14
7	Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.336.841,2	8,72
8	Transportasi dan Pergudangan	3.672.214,2	6,00
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.259.511,8	8,60
10	Informasi dan Komunikasi	5.860.659,7	9,60
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.713.399,0	2,80
12	Real Estat	4.014.538,6	6,55
13	Jasa Perusahaan	716.896,9	1,17
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.267.504,6	6,97
15	Jasa Pendidikan	5.200.921,6	8,50
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.330.853,5	2,17
17	Jasa lainnya	1.672.642,2	2,75
Total		61.203.445,8	100

Sumber: BPS 2016^a, 2016^b, 2016^c, 2016^d.

Berdasarkan Tabel 2. menunjukkan bahwa nilai PDRB ADHK tahun 2010 di kabupaten yang tergabung dalam Provinsi D.I Yogyakarta, sektor perekonomian selama lima tahun terakhir (2011-2015) didominasi oleh Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (12,54%) menjadi tumpuan dan harapan dalam mempengaruhi perekonomian

daerah serta memiliki potensi untuk dikembangkan di Provinsi D.I Yogyakarta. Sektor pertanian berperan sebagai penyokong bahan baku sektor industri.

Tabel 3. Nilai PDRB Sektor Pertanian ADHK Tahun 2010 di Kabupaten yang Terbagung dalam Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2011-2015

Daerah Istimewa Yogyakarta	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Kab. Bantul	1.809.397,1	1.913.122,8	1.964.025,9	1.912.487,9	1.961.983,0
Kab. Gunungkidul	2.354.431,5	2.452.276,5	2.508.677,4	2.493.155,8	2.557.403,2
Kab. Kulonprogo	1.047.680,0	1.104.310,0	1.131.360,0	1.120.170,0	1.143.120,0
Kab. Sleman	1.899.940,0	2.011.265,1	2.066.440,3	1.968.070,7	2.014.728,9
Total PDRB Sektor Pertanian	7.111.448,6	7.480.974,4	7.670.503,6	7.493.884,4	7.677.235,1

Sumber :BPS 2016^a, 2016^b, 2016^c,2016^d.

Berdasarkan Tabel 3. menunjukkan bahwa nilai PDRB sektor pertanian ADHK Tahun 2010 di Provinsi D.I Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun 2011-2015 akan tetapi pada tahun 2014 mengalami penurunan nilai PDRB. Nilai PDRB sektor pertanian di masing-masing kabupaten mengalami fluktuasi. Naik turunnya dipengaruhi oleh produksi yang dihasilkan dari setiap komoditas sektor pertanian.

Tabel 4. Nilai dan Kontribusi PDRB Sub Sektor Pertanian ADHK Tahun 2010 di Kabupaten yang Terbagung dalam Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2015.

No	Sub Sektor Pertanian	PDRB	
		Nilai	Kontribusi (%)
1	Pertanian, Peternakan, Pertanian dan Jasa Pertanian	6.677.030,8	10,9
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	700.221,9	1,14
3	Perikanan	299.982,4	0,5
	Jumlah Pertanian	7.677.235,1	12,54
	Non Pertanian	53.526.210,7	87,46

Sumber :BPS 2016^a, 2016^b, 2016^c,2016^d.

Berdasarkan Tabel 4. menunjukkan bahwa sub sektor Pertanian, Peternakan, Pertanian dan Jasa Pertanian memberikan kontribusi lebih besar pada PDRB sektor pertanian di Provinsi D.I Yogyakarta pada tahun 2015 sebesar 10,9%. Kondisi tersebut mengingat bahwa sub sektor Pertanian, Peternakan, Pertanian dan Jasa Pertanian sebagai penghasil pangan untuk kebutuhan pokok bagi masyarakat di Provinsi D.I Yogyakarta

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah atau wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita. Perkembangan pendapatan riil yang diterima oleh penduduk ditunjukkan oleh Pendapatan Regional per kapita.

Tabel 5. PDRB Per Kapita ADHK Tahun 2010 di Kabupaten yang Terbagung dalam Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2011-2015

Daerah Istimewa Yogyakarta	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Kab. Bantul	13.718.511,8	14.241.366,5	14.804.709,1	15.348.872,2	16.068.283,3
Kab. Gunungkidul	13.546.824,8	14.090.229,1	14.674.953,6	15.224.792,6	15.590.617,3
Kab. Kulonprogo	13.321.991,1	13.769.143,0	14.302.305,2	14.813.581,0	15.239.205,4
Kab. Sleman	20.341.249,4	21.198.358,4	22.115.602,4	22.973.562,6	24.120.027,6
Rata-rata PDRB Per Kapita	15.232.144,3	15.824.774,2	16.474.392,6	17.090.202,1	17.754.533,4

Sumber :BPS 2016^a, 2016^b, 2016^c,2016^d.

Berdasarkan Tabel 5. menunjukkan bahwa rata-rata PDRB per kapita kabupaten ADHK tahun 2010 di Provinsi D.I Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun ke tahun pada tahun 2011-2015 begitu pula dengan PDRB per kapita di setiap kabupaten yang tergabung dalam Provinsi D.I Yogyakarta juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun pada tahun 2011-2015.

Peningkatan PDRB per kapita yang merupakan hasil dari proses pembangunan tidak cukup untuk menunjukkan bahwa pembangunan telah berhasil. Hal ini dikarenakan peningkatan pendapatan tidak

menjamin bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan di daerah tersebut sudah berkurang.

Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa Provinsi Yogyakarta sebagai provinsi yang memiliki ketidakmerataan distribusi pendapatan tertinggi di Pulau Jawa. Provinsi Yogyakarta pada tahun 2015 merupakan provinsi dengan gini rasio tertinggi di Pulau Jawa dan tertinggi kedua di Indonesia setelah Gorontalo dan Papua. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa gini rasio Provinsi Yogyakarta pada tahun 2015 sebesar 0,42 mengartikan ketidakmerataan berada pada level tinggi serta mengindikasikan adanya distribusi pendapatan yang tidak merata atau kesenjangan antar wilayah dalam hal potensi ekonomi, keberhasilan pembangunan, atau kombinasi antara berbagai aspek secara sektoral.

Tujuan pembangunan ekonomi tidak hanya mencakup pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja, tetapi juga berkurangnya tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan di setiap sektor yang mendukung perekonomian daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan analisa tentang Peran Sektor Pertanian Terhadap Distribusi Pendapatan Kabupaten di Provinsi D.I Yogyakarta dengan menggunakan pendekatan *Minimum Requirements Technique* dan Indeks Williamson. membantu mengoptimalkan potensi di wilayah Provinsi D.I Yogyakarta untuk menunjang pembangunan wilayah dengan mengarahkan kepada prioritas pengembangan sub sektor, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan di sektor pertanian.

METODE PENELITIAN

Metode dasar penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Penelitian dilakukan di Kabupaten yang tergabung dalam Provinsi D.I Yogyakarta terdiri dari Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten

Sleman. Kontribusi PDRB Kabupaten menurut Lapangan Usaha ADHK Tahun 2010 di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2015 disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Kontribusi PDRB Kabupaten menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2015

No	Sektor Perekonomian	PDRB			
		Bantul	Gunungkidul	Kulonprogo	Sleman
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,56%	22,93%	18,19%	7,15%
2	Pertambangan dan Penggalian	0,65%	1,44%	1,46%	0,41%
3	Industri Pengolahan	14,58%	9,28%	12,36%	12,72%
4	Pengadaan Listrik, Gas	0,14%	0,09%	0,09%	0,11%
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08%	0,16%	0,13%	0,04%
6	Konstruksi	9,77%	9,29%	8,45%	11,07%
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,42%	9,31%	13,52%	7,57%
8	Transportasi dan Pergudangan	4,96%	5,22%	8,45%	6,33%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,54%	5,69%	3,67%	9,75%
10	Informasi dan Komunikasi	9,84%	9,06%	6,34%	10,34%
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,71%	2,14%	3,02%	3,05%
12	Real Estat	6,77%	3,52%	3,61%	8,29%
13	Jasa Perusahaan	0,55%	0,50%	0,33%	1,96%
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,81%	8,86%	8,17%	6,04%
15	Jasa Pendidikan	7,41%	6,67%	6,45%	10,27%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,93%	2,15%	1,55%	2,45%
17	Jasa lainnya	2,19%	3,60%	4,12%	2,37%

Sumber :BPS 2016^a, 2016^b, 2016^c,2016^d.

Berdasarkan Tabel 6. Kontribusi sektor pertanian yang besar pada setiap kabupaten yang tergabung dalam Provinsi D.I Yogyakarta terhadap PDRB masing-masing kabupaten. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian tetap menjadi tumpuan pada sektor perekonomian di Provinsi D.I Yogyakarta.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dokumen yang digunakan dalam penelitian adalah data tahun 2011-2015 dari Biro Pusat

Statistik (BPS) di kabupaten yang tergabung dalam Provinsi Yogyakarta, jurnal ilmiah, buku dan hasil penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan kajian yang dilakukan.

Metode analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *Minimum Requirements Technique* dan Indeks Williamson. Adapun cara implementasi metode, sebagai berikut:

1. Sub Sektor Pertanian Basis dan Non Basis Berdasarkan Pendekatan Minimum Requirements Technique (MRT)

Formulasi dari *Minimum Requirements Technique* (MRT) yang dikemukakan oleh Mustafa Dinc dapat ditulis dengan rumus :

$$\text{Share} = \frac{E_{ir}}{E_r}$$

Dimana :

E_{ir} = PDRB sub sektor pertanian i di wilayah r

E_r = Total PDRB sub sektor pertanian di wilayah r

i = 3 sub sektor pertanian (sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian, sub sektor kehutanan dan sub sektor perikanan)

r = 4 Daerah (Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Kulonprogo, dan Sleman)

Penentuan sub sektor basis dan sub sektor non basis pada PDRB total yaitu share paling kecil kemudian di identifikasi sebagai *Minimum Requiremenst* untuk memenuhi konsumsi lokal disebut sebagai non basis aktivitas ekonomi. Share yang lebih besar dari pada *Minimum Requirements* disebut dengan basis yang akan mengimplikasikan bahwa sebagian dari produksi industri adalah ditujukan untuk dieksport ke wilayah lain (Thulin, 2014).

2. Peran Sektor Pertanian Terhadap Distribusi Pendapatan

Formulasi indeks ketidakmerataan distribusi pendapatan antar daerah dengan mengikutsertakan PDRB sektor pertanian,

dikemukakan oleh Jeffrey G. Williamson (Sjafrizal, 2014):

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - y)^2 (f_i/n)}}{y}$$

yaitu $0 \leq w \leq 1$

Dimana :

V_w = Indeks Williamson

y_i = PDRB per kapita Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Kulonprogo, dan Sleman

y = PDRB per kapita rata-rata seluruh kabupaten di Provinsi D.I Yoyakarta

f_i = Jumlah penduduk Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Kulonprogo, dan Sleman

n = Jumlah penduduk seluruh daerah kabupaten di Provinsi D.I Yoyakarta

Untuk mengetahui peran sektor pertanian terhadap ketidakmerataan distribusi pendapatan, maka dilakukan juga perhitungan Indeks Williamson dengan mengeluarkan PDRB sektor pertanian dari PDRB total. Berikut formulasi yang digunakan:

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - y)^2 (f_i/n)}}{y}$$

yaitu $0 \leq w \leq 1$

Dimana :

V_w = Indeks Williamson

y_i = PDRB per kapita tanpa PDRB sektor pertanian Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Kulonprogo, dan Sleman

y = PDRB per kapita rata-rata seluruh kabupaten di Provinsi D.I Yoyakarta

f_i = Jumlah penduduk Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Kulonprogo, dan Sleman

n = Jumlah penduduk seluruh daerah kabupaten di Provinsi D.I Yoyakarta

Kriteria dalam perhitungan Indeks Williamson, yaitu jika Indeks Williamson menunjukkan :

- 1) Angka 0,0 sampai 0,2 maka ketidakmerataan rendah
- 2) Angka 0,21 sampai 0,35 maka ketidakmerataan sedang, dan
- 3) Angka >0,35 maka ketidakmerataan tinggi (Arsyad, 2010).

Selanjutnya, nilai Indeks Williamson dengan pertanian dan tanpa pertanian dilakukan analisa menggunakan uji T sampel berpasangan untuk menunjukkan perbedaan yang signifikan diantara kedua nilai tersebut.

Dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak H_0 pada uji *paired sample T-test* adalah sebagai berikut :

- 1) Jika probabilitas nilai Indeks Williamson < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- 2) Jika probabilitas nilai Indeks Williamson > 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak (Widiyanto, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta

Provinsi D.I Yogyakarta terletak di bagian selatan tengah Pulau Jawa yang dibatasi oleh Samudera Hindia di bagian selatan dan Provinsi Jawa Tengah di bagian lainnya. Provinsi ini memiliki 4 kabupaten yaitu Bantul, Kulonprogo, Gunungkidul dan Sleman. Total luas wilayah dari keempat kabupaten di Provinsi D. I. Yogyakarta adalah 315.330 Ha. Jumlah penduduk di kabupaten yang tergabung dalam Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2015 adalah 3.266.472. Angka *sex ratio* dari keseluruhan Kabupaten sebesar 97,43%, yang artinya bahwa terdapat 97,43 orang penduduk laki-laki dari setiap 100 penduduk perempuan di Provinsi D. I. Yogyakarta. Angka beban tanggungan tahun 2015 di wilayah ini adalah 45,89 yang artinya secara ekonomi setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 45 penduduk usia non produktif. Lapangan pekerjaan di bidang pertanian di semua kabupaten dalam Provinsi D.I

Yogyakarta menyerap tenaga kerja 433.329 jiwa dengan persentase 25,77%.

2. Sub Sektor Pertanian Basis dan Non Basis Berdasarkan Pendekatan *Minimum Requirements Technique* (MRT) di Provinsi D.I Yogyakarta

Pertumbuhan kawasan andalan diharapkan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi wilayah sekitar (*hinterland*), dan penggerak perekonomian antardaerah. Tujuan dari kawasan andalan adalah mempercepat pembangunan (Wijaya, 2006).

Tabel 7. Nilai Share MRT Sub Sektor Pertanian Basis dan Non Basis Pada Kabupaten di Provinsi Yogyakarta Tahun 2011-2015

Tahun	Sub Sektor Pertanian	Nilai Share MRT Sub Sektor Pertanian Basis dan Non-Basis			
		Bantul	Gunungkidul	Kulonprogo	Sleman
2011	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	0,9309	0,8202	0,7703	0,9378
	Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,0352	0,1483	0,1844	0,0256
	Perikanan	0,0285	0,0315	0,0453	0,0312
2012	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	0,9315	0,8223	0,7853	0,9436
	Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,0341	0,1466	0,1677	0,0246
	Perikanan	0,0294	0,0311	0,0470	0,031
2013	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	0,9306	0,8239	0,7871	0,9431
	Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,0339	0,1442	0,1642	0,0243
	Perikanan	0,0306	0,0319	0,0488	0,0327
2014	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	0,9243	0,8182	0,7802	0,9391
	Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,0361	0,1483	0,1684	0,0261
	Perikanan	0,0315	0,0335	0,0514	0,0348
2015	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	0,9229	0,8162	0,7782	0,9378
	Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,0365	0,1496	0,1690	0,0263
	Perikanan	0,0315	0,0342	0,0528	0,0359

Sumber : Analisis Data Sekunder

Berdasarkan Tabel 7. menunjukkan bahwa hasil analisis menggunakan MRT tahun 2011-2015 pada setiap kabupaten memiliki sub sektor basis dan non basis yang berbeda-beda pada masing-masing daerah. Kabupaten Bantul memiliki sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian basis, sub sektor kehutanan dan penebangan kayu basis, sedangkan sub sektor perikanan termasuk non basis. Kabupaten Gunungkidul memiliki sub sektor basis yaitu pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian, sub sektor kehutanan dan penebangan kayu dan sub sektor perikanan. Kabupaten Kulonprogo memiliki sub sektor kehutanan dan penebangan kayu basis, sub sektor perikanan basis, sedangkan sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian termasuk non basis. Kabupaten Sleman memiliki sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian basis, sub sektor perikanan basis, sedangkan sub sektor kehutanan dan penebangan kayu termasuk non basis.

Sub sektor basis mampu berkembang dan bersaing dengan daerah lain dan membantu mengoptimalkan potensi wilayah. Daerah yang memiliki sub sektor basis maka daerah tersebut mampu memenuhi kebutuhan lokal daerahnya dan sisanya dapat di ekspor ke daerah lain, sehingga akan menghasilkan pendapatan.

Sedangkan daerah yang memiliki sub sektor non basis untuk memenuhi kebutuhan lokal masyarakat. Karena sifatnya memenuhi kebutuhan lokal maka permintaan sektor ini sangat dipengaruhi tingkat pendapatan masyarakat setempat maka kenaikannya sejalan dengan kenaikan pendapatan masyarakat setempat.

3. Peran Sektor Pertanian Terhadap Distribusi Pendapatan Kabupaten di Provinsi D.I Yogyakarta

Ketidakmerataan distribusi ekonomi antar wilayah yang besar

akan menyebabkan kurang efisiennya penggunaan sumber daya yang tersedia dan mendorong terjadinya ketidakmerataan distribusi pendapatan (Sjafrizal, 2008).

Tabel 8. Nilai Indeks Williamson Dengan dan Tanpa Sektor Pertanian dalam PDRB Kabupaten Bantul di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2011-2015

Tahun	Indeks Williamson		Perubahan (%)
	Dengan Sektor Pertanian	Tanpa Sektor Pertanian	
2011	0,0542	0,0435	-24,59
2012	0,0546	0,0442	-23,52
2013	0,0553	0,0453	-22,07
2014	0,0557	0,0456	-22,14
2015	0,0517	0,0423	-22,22
Sig. (2-tailed)		.000	

Sumber : Analisis Data Sekunder

Berdasarkan Tabel 8. menunjukkan bahwa nilai Indeks Williamson dengan sektor pertanian di Kabupaten Bantul tahun 2011-2015 antara 0,0517-0,0557. Berdasarkan kriteria dalam perhitungan Indeks Williamson menurut Arsyad (2010) ketidakmerataan distribusi pendapatan di Kabupaten Bantul termasuk kategori rendah, hal ini ditunjukkan pada nilai Indeks Williamson dengan pertanian yang berada pada kriteria antara 0,0-0,2. Nilai paling tinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu 0,0557 dan paling rendah terjadi pada tahun 2015 yaitu 0,0517. Ketidakmerataan distribusi pendapatan pada tahun 2011-2014 selalu mengalami peningkatan namun pada tahun 2015 mengalami penurunan. Tren ketidakmerataan distribusi pendapatan di Kabupaten Bantul yang terjadi selama tahun 2011-2015 mengalami peningkatan, hal ini ditunjukkan dengan besarnya angka Indeks Williamson yang meningkat mengartikan bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan semakin melebar.

Nilai Indeks Williamson tanpa sektor pertanian di Kabupaten Bantul mengalami penurunan menjadi antara 0,0423-0,0456 artinya ketidakmerataan distribusi pendapatan rendah. Tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan dengan dan tanpa sektor pertanian memiliki kriteria sama-sama berada antara 0,0-0,2 yang termasuk pada kategori rendah. Nilai menjadi lebih rendah ketika tanpa memasukkan sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten Bantul lalu dibandingkan dengan memasukkan sektor pertanian menunjukkan bahwa sektor pertanian di Kabupaten Bantul berperan dalam meningkatkan ketidakmerataan distribusi pendapatan. Hasil uji *Paired sample T-test* dengan tingkat kepercayaan 95% atau $\alpha=0,05$ (5%), menghasilkan Sig. (2-tailed) sebesar $0,00 < 0,05$ yang dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai Indeks Williamson dengan sektor pertanian dan nilai Indeks Williamson tanpa PDRB sektor pertanian di Kabupaten Bantul.

Faktor terjadinya penurunan nilai Indeks Williamson ketika tanpa memasukkan sektor pertanian dikarenakan sumbangan nilai sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bantul yang tidak terlalu tinggi dan pertumbuhan sektor perekonomian lebih dominan dipengaruhi oleh sektor industri pengolahan. Selain itu, ketidakmerataan distribusi pendapatan juga dipengaruhi oleh pendapatan per kapita dan jumlah penduduk. Menurut Hendra (2004), berdasarkan hasil penelitiannya terdapat korelasi yang kuat antara pendapatan per kapita dengan ketidakmerataan distribusi pendapatan terjadinya peningkatan pendapatan per kapita yang dapat menimbulkan ketidakmerataan distribusi pendapatan akan semakin besar atau melebar. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan yang berlangsung pada suatu wilayah dipusatkan pada sektor non

pertanian yang banyak penyerapan tenaga kerjanya menyebabkan kesenjangan antar sektor perekonomian menjadi meningkat begitupula dengan ketidakmerataan distribusi pendapatan menjadi semakin melebar.

Tabel 9. Nilai Indeks Williamson Dengan dan Tanpa Sektor Pertanian dalam PDRB Kabupaten Gunungkidul di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2011-2015

Tahun	Indeks Williamson		Perubahan (%)
	Dengan Sektor Pertanian	Tanpa Sektor Pertanian	
2011	0,0517	0,0985	47,51
2012	0,0511	0,0969	47,26
2013	0,0508	0,0952	46,63
2014	0,0507	0,0934	45,71
2015	0,0570	0,0988	42,30
Sig. (2-tailed)		.000	

Sumber : Analisis Data Sekunder

Berdasarkan Tabel 9. menunjukkan bahwa nilai Indeks Williamson dengan sektor pertanian di Kabupaten Gunungkidul tahun 2011-2015 antara 0,0507-0,0517. Berdasarkan kriteria dalam perhitungan Indeks Williamson menurut Arsyad (2010) ketidakmerataan distribusi pendapatan di Kabupaten Gunungkidul termasuk kategori rendah, hal ini ditunjukkan pada nilai Indeks Williamson dengan pertanian yang berada pada kriteria antara 0,0-0,2. Nilai paling tinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu 0,0570 dan paling rendah terjadi pada tahun 2014 yaitu 0,0507. Ketidakmerataan distribusi pendapatan pada tahun 2011-2014 mengalami penurunan namun pada tahun 2015 mengalami kenaikan. Tren ketidakmerataan distribusi pendapatan di Kabupaten Gunungkidul yang terjadi selama tahun 2011-2015 mengalami penurunan. Hal ini ditunjukkan dengan semakin kecilnya angka Indeks

Williamson yang menurun mengartikan ketidakmerataan distribusi pendapatan semakin mengecil.

Nilai Indeks Williamson tanpa sektor pertanian di Kabupaten Gunungkidul mengalami kenaikan menjadi antara 0,0934-0,0988 artinya ketidakmerataan distribusi pendapatan rendah. Tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan dengan dan tanpa sektor pertanian memiliki kriteria sama-sama berada antara 0,0-0,2 yang termasuk pada kategori rendah. Nilai menjadi lebih tinggi ketika tanpa memasukkan sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten Gunungkidul lalu dibandingkan dengan memasukkan sektor pertanian menunjukkan bahwa sektor pertanian di Kabupaten Gunungkidul berperan dalam mengurangi ketidakmerataan distribusi pendapatan. Hasil uji *Paired sample T-test* dengan tingkat kepercayaan 95% atau $\alpha=0,05$ (5%), menghasilkan Sig. (2-tailed) sebesar $0,00 < 0,05$ yang dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai Indeks Williamson dengan sektor pertanian dan nilai Indeks Williamson tanpa PDRB sektor pertanian di Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 10. Nilai Indeks Williamson Dengan dan Tanpa Sektor Pertanian dalam PDRB Kabupaten Kulonprogo di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2011-2015

Tahun	Indeks Williamson		Perubahan (%)
	Dengan Sektor Pertanian	Tanpa Sektor Pertanian	
2011	0,0445	0,0591	24,70
2012	0,0460	0,0612	24,83
2013	0,0467	0,0616	24,18
2014	0,0471	0,0616	23,53
2015	0,0503	0,0644	21,89
	Sig. (2-tailed)	.000	

Sumber : Analisis Data Sekunder

Berdasarkan Tabel 10. menunjukkan bahwa nilai Indeks Williamson dengan sektor pertanian di Kabupaten Kulonprogo tahun 2011-2015 antara 0,0445-0,0503. Berdasarkan kriteria dalam perhitungan Indeks Williamson menurut Arsyad (2010) ketidakmerataan distribusi pendapatan di Kabupaten Kulonprogo termasuk kategori rendah, hal ini ditunjukkan pada nilai Indeks Williamson dengan pertanian yang berada pada kriteria antara 0,0-0,2. Nilai paling tinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu 0,0503 dan paling rendah terjadi pada tahun 2011 yaitu 0,0445. Tren ketidakmerataan distribusi pendapatan di Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2011-2015 cenderung mengalami kenaikan. Hal ini ditunjukkan dengan semakin besarnya angka Indeks Williamson di Kabupaten Kulonprogo tahun 2011-2015 cenderung mengalami peningkatan pada setiap tahunnya ketidakmerataan distribusi pendapatan yang terjadi semakin melebar.

Nilai Indeks Williamson tanpa sektor pertanian di Kabupaten Kulonprogo mengalami kenaikan menjadi antara 0,0591-0,0644 artinya ketidakmerataan distribusi pendapatan rendah. Tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan dengan dan tanpa sektor pertanian memiliki kriteria sama-sama berada antara 0,0-0,2 yang termasuk pada kategori rendah. Nilai menjadi lebih tinggi ketika tanpa memasukkan sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten Kulonprogo lalu dibandingkan dengan memasukkan sektor pertanian menunjukkan bahwa sektor pertanian di Kabupaten Kulonprogo berperan dalam mengurangi ketidakmerataan distribusi pendapatan. Hasil uji *Paired sample T-test* dengan tingkat kepercayaan 95% atau $\alpha=0,05$ (5%), menghasilkan Sig. (2-tailed) sebesar $0,00 < 0,05$ yang dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara

nilai Indeks Williamson dengan sektor pertanian dan nilai Indeks Williamson tanpa PDRB sektor pertanian di Kabupaten Kulonprogo.

Tabel 11. Nilai Indeks Williamson Dengan dan Tanpa Sektor Pertanian dalam PDRB Kabupaten Sleman di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2011-2015

Tahun	Indeks Williamson		Perubahan (%)
	Dengan Sektor Pertanian	Tanpa Sektor Pertanian	
2011	0,2004	0,2730	26,59
2012	0,2031	0,2761	26,43
2013	0,2051	0,2763	25,76
2014	0,2064	0,2750	24,94
2015	0,2143	0,2811	23,76
Sig. (2-tailed)		.000	

Sumber : Analisis Data Sekunder

Berdasarkan Tabel 11. menunjukkan bahwa nilai Indeks Williamson dengan sektor pertanian di Kabupaten Sleman tahun 2011-2015 antara 0,2004-0,2143. Berdasarkan kriteria dalam perhitungan Indeks Williamson menurut Arsyad (2010) ketidakmerataan distribusi pendapatan di Kabupaten Sleman termasuk kategori sedang, hal ini ditunjukkan pada nilai Indeks Williamson dengan pertanian yang berada pada kriteria antara 0,21-0,35. Nilai paling tinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu 0,2143 dan paling rendah terjadi pada tahun 2011 yaitu 0,2004. Tren ketidakmerataan distribusi pendapatan di Kabupaten Sleman pada tahun 2011-2015 cenderung mengalami kenaikan. Hal ini ditunjukkan dengan semakin besarnya angka Indeks Williamson di Kabupaten Sleman tahun 2011-2015 cenderung mengalami peningkatan pada setiap tahunnya ketidakmerataan distribusi pendapatan yang terjadi semakin melebar.

Nilai Indeks Williamson tanpa sektor pertanian di Kabupaten Sleman mengalami kenaikan menjadi antara 0,2730-0,2811 artinya ketidakmerataan distribusi pendapatan sedang. Tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan dengan dan tanpa sektor pertanian memiliki kriteria sama-sama berada antara 0,21-0,35 yang termasuk pada kategori sedang. Nilai menjadi lebih tinggi ketika tanpa memasukkan sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten Sleman lalu dibandingkan dengan memasukkan sektor pertanian menunjukkan bahwa sektor pertanian di Kabupaten Sleman berperan dalam mengurangi ketidakmerataan distribusi pendapatan. Selanjutnya, nilai Indeks Williamson dari memasukkan dengan atau tanpa PDRB sektor pertanian dilakukan uji perbedaan dengan *Paired sample t-test* dimana nilai tersebut mengalami dua perlakuan berbeda pada situasi sebelum dan sesudah adanya sektor pertanian yang akan menunjukkan apakah nilai yang dihasilkan berbeda secara nyata ataukah tidak. Hasil uji *Paired sample T-test* dengan tingkat kepercayaan 95% atau $\alpha=0,05$ (5%), menghasilkan Sig. (2-tailed) sebesar $0,00 < 0,05$ yang dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai Indeks Williamson dengan sektor pertanian dan nilai Indeks Williamson tanpa PDRB sektor pertanian di Kabupaten Sleman.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan berikut:

1. Sub sektor pertanian basis dan non basis di kabupaten yang tergabung dalam Provinsi Yogyakarta Tahun 2011-2015 berdasarkan analisis *Minimum Requirements Technique* (MRT) adalah sebagai berikut:

a. Kabupaten Bantul :

- 1) Sub sektor basis : sub sektor pertanian, peternakan, perburuan,

- jasa pertanian dan sub sektor kehutanan, penebangan kayu.
- 2) Sub non basis : sub sektor perikanan.
- b. Kabupaten Gunungkidul :
Sub sektor basis : sub sektor pertanian, peternakan, perburuan, jasa pertanian dan sub sektor kehutanan dan penebangan kayu serta sub sektor perikanan.
- c. Kabupaten Kulonprogo :
1) Sub sektor basis : sub sektor kehutanan, penebangan kayu dan sub sektor perikanan.
2) Sub sektor non basis : sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian.
- d. Kabupaten Sleman
1) Sub sektor basis : sub sektor pertanian, peternakan, perburuan, jasa pertanian dan sub sektor perikanan.
2) Sub sektor non basis : sub sektor kehutanan dan penebangan kayu.
2. Peran sektor pertanian terhadap distribusi pendapatan di kabupaten yang tergabung dalam Provinsi Yogyakarta Tahun 2011-2015 berdasarkan analisis Indeks Williamson adalah sebagai berikut:
- a. Sektor pertanian di Kabupaten Gunungkidul, Kulonprogo dan Sleman berperan mengurangi ketidakmerataan distribusi pendapatan pada masing-masing wilayah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Indeks Williamson lebih tinggi ketika tanpa memasukkan sektor pertanian dalam analisis.
- b. Sektor pertanian di Kabupaten Bantul berperan meningkatkan ketidakmerataan distribusi pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Indeks Williamson lebih rendah ketika tanpa memasukkan sektor pertanian dalam analisis.
- Yogyakarta: STIE YKPN Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Yogyakarta Dalam Angka 2016*. BPS Yogyakarta.
- . 2016^a. *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bantul Tahun 2016*. Bantul.
- . 2016^b. *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016*. Gunungkidul.
- . 2016^c. *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kulonprogo Tahun 2016*. Kulonprogo.
- . 2016^d. *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sleman Tahun 2016*. Sleman.
- Basuki, Agus Tri dan Utari Gayatri. 2009. *Penentu Sektor Unggulan Dalam Pembangunan Daerah: Studi Kasus Di Kabupaten Ogan Komering Ilir*. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*. Vol 10 (1) : 34-35.
- Dinc, Mustafa. 2002. *Regional and Local Economic Analysis Tools*. Washington, DC : The World Bank.
- Hendra. 2004. *Peranan Sektor Pertanian Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Lampung*. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Dan Manajemen. Bogor : Institut Pertanian Bogor.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Padang: Badouse Media.
- . 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutrisno, Adi. 2012. *Analisis Ketimpangan Pendapatan dan Pengembangan Sektor Unggulan Di Kabupaten Dalam Kawasan Barlingmascakeb Tahun*

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad. Lincoln. 2004. *Ekonomi Pembangunan, Edisi Keempat*.

- 2007-2010. *Economics Development Analysis Journal*. Vol 1 (1) : 31.
- Thulin, Per, 2014. *Local Multiplier and Economic Base Analysis. Research Network Debate*. Swedish Entrepreneur Forum.
- Widiyanto, Mikha Agus, 2013. *Statistika Terapan Konsep dan Aplikasi SPSS/Lisrel dalam Penelitian Pendidikan, Psikologi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Wijaya, Bayu dan Hastarini Dwi Atmanti, 2006. Analisis Pengembangan Wilayah Dan Sektor Potensial Guna Mendorong Pembangunan Di Kota Salatiga. *Jurnal Dinamika Pembangunan*. Vol 3 (2) :101-102.